

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong mandiri dengan tingkat kemandirian yang tinggi dan pola hubungan delegatif termasuk kedalam interval 75% - 100% mulai dari tahun 2012 hingga 2016 yaitu dengan rata-rata sebesar 123,80%.
2. Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD tergolong dalam kriteria efektif pada tahun 2012 sebesar 92,65%, tergolong dalam kriteria kurang efektif pada tahun 2013 sebesar 74,04%, tergolong dalam kriteria cukup efektif pada tahun 2014 sebesar 86,13%, pada tahun 2015 dan tahun 2016 tergolong dalam kriteria sangat efektif masing-masing sebesar 105,63% dan 105,61%.
3. Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, jika dilihat dari Rasio Efisiensi PAD tergolong kedalam kriteria sangat efisien dengan interval Di bawah dari 60% mulai dari tahun 2012 hingga 2016 yaitu dengan rata-rata sebesar 1,96%.
4. Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, jika dilihat dari Rasio Keserasian dapat dikatakan sesuai proporsi pada umumnya baik belanja operasi maupun belanja modalnya. Belanja operasi mampu berada dalam interval 60% - 90% yaitu dengan rata-rata sebesar 70,08% dari total belanja daerah. Dan untuk belanja modal berada dalam interval 5% - 20% yaitu pada tahun 2012 sebesar 11,77%, pada tahun 2013 menjadi 9,99%, kemudian sebesar 20,65% pada tahun 2014, pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 16,74% dan 15,74%. Menurut data keuangan Provinsi Sumatera Utara, dana yang dimiliki Pemerintah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil tiap tahunnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan lebih besarnya Rasio Belanja Operasi dibandingkan dengan Rasio

Belanja Modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi tiap tahunnya, menjadikan belanja modal pada Provinsi Sumatera Utara menjadi relatif kecil untuk pertumbuhan pembangunan yang ada pada Provinsi Sumatera Utara.

5. Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan mulai dari tahun 2012 hingga 2016 menunjukkan persentase yang positif tiap tahunnya. Dengan maksud bahwa tiap tahunnya mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya yaitu dengan rata-rata sebesar 5,25% dan 10,01%. Berdasarkan perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pertumbuhan belanja operasinya menunjukkan persentase yang negatif dari tahun 2013 hingga 2015 dengan rata-rata sebesar -9,04%, hingga pada tahun 2016 baru mengalami pertumbuhan belanja operasi yang positif sebesar 20,95%. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Belanja Modal, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013 sebesar -5,34%, pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 50,64%, kemudian pada tahun 2015 sebesar -18,65% dan pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 9,40%. Pertumbuhan belanja operasi dan belanja modal adalah potensi yang perlu di evaluasi dan mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara meningkatkan dan memaksimalkannya, melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar juga berkelanjutan untuk menghindari terjadinya kecurangan ataupun penyalahgunaan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut bertujuan agar kedepannya Provinsi Sumatera Utara dapat tumbuh semakin mandiri, dapat meminimalisir ketergantungan sumber dana, mampu mengelola keuangannya dengan baik, benar serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. Selain itu, sebaiknya pemerintah membuat analisis rasio keuangan daerah dan mempublikasinya tiap tahun agar masyarakat dapat

mengetahui dengan mudah kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang lebih menyeluruh. Kemudian peneliti disarankan untuk lebih memperdalam penelitiannya lagi atas sebab-sebab eksternal terjadinya perubahan, baik itu negatif maupun positif mengenai kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah terhadap keuangan suatu daerah